



LAPORAN KINERJA

PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DAN INTEGRASI MODA

20
22



RINGKASAN

EKSEKUTIF

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda merupakan salah satu Unit Kerja Pemerintah dibawah Badan Kebijakan Transportasi. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki tugas untuk melaksanakan Analisis dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di bidang Prasarana Transportasi Dan Integrasi Moda. Termasuk didalamnya adalah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran kegiatan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam setiap perencanaannya. Permasalahan yang dihadapi selama ini dengan adanya tumpang tindih pelaksanaan Analisis kebijakan dengan subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi antar institusi dalam penyelenggaraan Analisis kebijakan. Atmosfir transformasi kelembagaan Badan Kebijakan Perhubungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program reformasi birokrasi yang mengarah pada Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan dampak positif dengan konsep mirroring dimana informasi hasil Analisi yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi. Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Kebijakan Perhubungan dan Unit Eselon 2 di Lingkungan Badan Kebijakan Perhubungan dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan para Kepala Daerah serta stakeholder terkait yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan.

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda telah melaksanakan sasaran tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah direncanakan selama tahun 2022, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang sudah terselesaikan meliputi beberapa kajian diantaranya: Penyesuaian Arah Landasan Pacu Bandar Udara Ibu Kota Negara (IKN) Baru dengan Pertimbangan Arah Angin dan Bandar Udara Existing; Penetapan Military Training Area (MTA) dengan

Memperhatikan Rute Penerbangan Internasional dan Rute VFR yang ada di Sekitar Ruang Udara IKN Baru; Evaluasi Pengembangan Jaringan dan Rute Penerbangan di Indonesia; Pengembangan Bisnis Navigasi Penerbangan melalui Optimalisasi Sumber Daya yang Dimiliki dan Dikuasai oleh AirNav Indonesia; Persepsi Masyarakat terhadap Penghapusan Syarat Tes PCR/Antigen untuk Perjalanan Transportasi Udara bagi Penumpang yang telah Mendapatkan Vaksin Booster; Dukungan Sektor Transportasi Udara terhadap Ekspor Hasil Perikanan Tangkap; Pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor Transportasi Udara; Pembiayaan Kreatif dan Optimalisasi Aset di Sektor Transportasi Udara; Mitigasi Keterbatasan Supply Armada Pesawat Udara terhadap Peningkatan Demand Angkutan Udara; dan Penetapan Kriteria Multi-Airport System (MAS) terhadap Bandar Udara yang Berdekatan.

Pada tahun 2022, nilai rata-rata kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda secara keseluruhan ditunjukkan melalui nilai capaian kinerja per kegiatan 117,5%. Sedangkan untuk perihal realisasi anggaran pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp7.119.120.494,00 Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.143.056.000,00 maka daya serap adalah sebesar 99,66%, dimana seluruhnya termasuk dalam kategori belanja barang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, atas segala karunia-Nya, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2022 dapat terselesaikan.

LKIP disusun sebagai implementasi dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang selanjutnya dijabarkan di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyusunan LKIP. Sistematika pelaporan

LKIP disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. LKIP ini berisikan pendahuluan, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sekaligus juga merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda serta sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pada tahun mendatang.

Akhirnya semoga Tuhan YME selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas di masa mendatang.



Jakarta, Januari 2023
KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA
TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

CAPT. NOVYANTO WIDADI, S.A.P., M.M
NIP. 196811232016111001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	39

PENDAHULUAN

BAB I



1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda tahun 2022 disusun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, mulai dari Eselon II ke atas harus mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Pelaporan kinerja bertujuan memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas rencana kinerja yang telah diperjanjikan dengan target yang diinginkan untuk tercapai. Penyusunan laporan kinerja Badan Kebijakan Transportasi berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Saat ini yang dipertanggungjawabkan bukan hanya LKIP, tetapi SAKIP dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan kinerja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan akuntabilitas ini dimaksudkan untuk dapat melihat seberapa besar manfaat atau hasil yang dicapai Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja penyelenggaraan Analisis dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Unit Kerja

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
2. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
3. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
4. Penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
6. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda; dan
7. Penyiapan pelaksanaan urusan administrasi.

Struktur organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Susunan Organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berserta fungsinya sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Pada struktur organisasi ini terdapat satu jabatan setingkat eselon II, dua jabatan eselon III, dan kelompok jabatan fungsional

1. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda

Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, Dan Integrasi Moda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- d) penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- e) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda; dan
- f) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda.

2. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan

Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- d) Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan; dan
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan

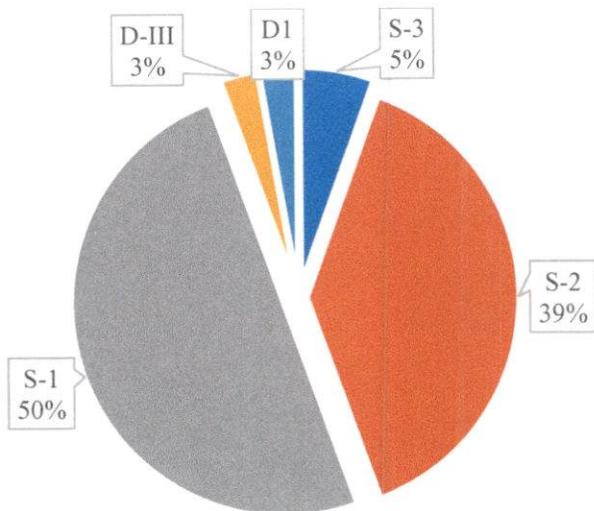
1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja

Jumlah pegawai Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sampai 31 Desember 2022 sebanyak 42 orang dengan komposisi pegawai Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berdasarkan golongan, pendidikan, dan jabatan structural masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3, berikut ini:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2022

NO.	JENIS GOLONGAN	TAHUN 2022
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	34
3.	Golongan II	2
4.	Golongan I	-
Jumlah Pegawai		42

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2022



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	TAHUN 2022
1.	Struktural	3
2.	Analisis Kebijakan	16
3.	Perencanaan	2
4.	Statistik	2
5.	Pranata Komputer	2
6.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	1
7.	Non Fungsional	16
Jumlah Pegawai		42

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2022

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabfung Analis Kebijakan per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	TAHUN 2021
1.	Analisis Madya	2
2.	Analisis Muda	5
3.	Analisis Pertama	2
4.	Calon Analisis Pertama	7
Jumlah		16

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2022

1.4 Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan

Kemampuan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda untuk membangun organisasi yang sehat dan manajemen yang bersih serta transparan sudah dioptimalkan. Keadaan ini tampak dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai lembaga pemberi masukan kebijakan dalam bidang prasaran Transportasi dan Integrasi Moda, namun keterbatasan jumlah pegawai, dan alokasi anggaran menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam melaksanakan kegiatan kajian kebijakan.

Kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang sudah terselesaikan meliputi beberapa kajian isu strategis diantaranya: Penyesuaian Arah Landasan Pacu Bandar Udara Ibu Kota Negara (IKN) Baru dengan Pertimbangan Arah Angin dan Bandar Udara Existing; Penetapan *Military Training Area* (MTA) dengan Memperhatikan Rute Penerbangan Internasional dan Rute VFR yang ada di Sekitar Ruang Udara IKN Baru; Evaluasi Pengembangan Jaringan dan Rute Penerbangan di Indonesia; Pengembangan Bisnis Navigasi Penerbangan melalui Optimalisasi Sumber Daya yang Dimiliki dan Dikuasai oleh AirNav Indonesia; Persepsi Masyarakat terhadap Penghapusan Syarat Tes PCR/Antigen untuk Perjalanan Transportasi Udara bagi Penumpang yang telah Mendapatkan *Vaksin Booster*; Dukungan Sektor Transportasi Udara terhadap Ekspor Hasil Perikanan Tangkap; Pemanfaatan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) di sektor Transportasi Udara; Pembiayaan Kreatif dan Optimalisasi Aset di Sektor Transportasi Udara; Mitigasi Keterbatasan *Supply* Armada Pesawat Udara terhadap Peningkatan Demand Angkutan Udara; dan Penetapan Kriteria *Multi-Airport System* (MAS) terhadap Bandar Udara yang Berdekatan.

Kelemahan yang dapat diidentifikasi menjadi kendala pelaksanaan kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda adalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM Analis Kebijakan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kunitas Analisis Kebijakan di bidang Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, ke depannya akan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya untuk diikutsertakan dalam kegiatan analisis kebijakan sebagai narasumber dan dewan pakar, dengan harapan kemampuan SDM analis kebijakan sekaligus dapat ditingkatkan melalui *sharing* informasi dari narasumber.

Sedangkan isu strategis tahun 2022 berdasarkan penugasan Menteri Perhubungan meliputi:

1. Implementasi Penggunaan Kendaraan Listrik
2. Program Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
3. Pembangunan KA Ringan LRT
4. Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT)
5. Pembangunan dan Rencana Pengoperasian KA Makassar-Pare Pare
6. Pengelolaan terminal khusus (tarsus) dan BUP
7. Pengoperasian Perintis Angkutan Laut
8. Pengoperasian Tol Laut
9. PNBP pada Transportasi Laut
10. Pola Pengembangan *Hub and Spoke* pada Transportasi Udara
11. Kebijakan Pentarifan Angkutan Udara

Adanya kejadian luar biasa pemindahan nomenclatur peneliti yang menjadi terpusat ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada pertengahan anggaran sampai akhir masa anggaran berjalan 2022 menyebabkan pelaksanaan kegiatan rutin dan penugasan khusus dari pimpinan terkendala dari sisi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa terlaksana dikarenakan pemblokiran anggaran. Namun demikian, beberapa *output* penyusunan policy brief kebijakan pada Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan dengan baik meskipun dalam keadaan keterbatasan anggaran.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada sub bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan;
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu



BAB III

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Dokumen Rencana Strategis Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Perhubungan Tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kebijakan Perhubungan Nomor SK 145 Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Kebijakan Perhubungan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (RPJM Nasional 2020–2024) sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 Tahap Keempat Tahun 2020–2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020–2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Perhubungan menjadi pedoman dan komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan strategis serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Perhubungan dalam kurun waktu 2020–2024. Rencana strategis dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan.

Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan Analisi dan pengembangan di bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki potensi untuk dapat menjadi pusat unggulan Analisis kebijakan transportasi bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien. Termasuk didalamnya adalah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran kegiatan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam setiap perencanaannya.

Permasalahan yang dihadapi selama ini dengan adanya tumpang tindih pelaksanaan Analisis dengan subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi antar institusi dalam penyelenggaraan Analisis. Atmosfir transformasi kelembagaan Badan Kebijakan Perhubungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program reformasi birokrasi yang mengarah pada Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan dampak positif dengan konsep mirroring dimana informasi

hasil Analisi yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi.

Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Kebijakan Perhubungan dan Unit Eselon 2 di Lingkungan Badan Kebijakan Perhubungan dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan para Kepala Daerah serta stakeholder terkait yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan. Dalam mencapai target kinerja yang optimal Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki Visi, Misi, dan Tujuan untuk mencapai sasaran organisasi.

VISI

Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi 2020-2024 ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2020-2024. Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

“Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (*Center of Excellence*) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang secara cepat, akurat dan manfaat guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Dukungan pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dan Badan Kebijakan Perhubungan oleh Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dilakukan melalui perannya sebagai penyusun kebijakan bidang transportasi melalui pelaksanaan kegiatan Analisi dan pengembangan bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda.

M I S I

Untuk mendukung tercapainya Visi Badan Kebijakan Transportasi **sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif**, ditetapkan Misi

Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan transportasi secara holistik, integratif, tematik, spesial (HITS).
2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (*evidence and knowledge-based policy*).
3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi.
4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi.

Penguatan SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

T U J U A N

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari Misi Badan Kebijakan Transportasi dengan memperhatikan Visi. Untuk mewujudkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, maka Tujuan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam pemberian rekomendasi kebijakan strategis bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
2. Terwujudnya dukungan tata kelola Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator pada tujuan yang selanjutnya dijabarkan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusjak Prasarna Transportasi dan Integrasi Moda tahun 2020-2024 disusun dengan berbasis pada *outcome*. Dimana *outcome* yang dimaksud berasal dari capaian sasaran

kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang telah dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran kegiatan ini dirumuskan dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, Visi, Misi, dan Tujuan Badan Kebijakan Perhubungan serta tujuan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan memperhatikan permasalahan dan rencana capaian pada tahun 2020-2024. Penjabarannya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, internal proses perspective sebagai berikut:

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit Eselon II, Sasaran Program Pertama (SP.1) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) yaitu:

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai adalah Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, yang diampu oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

IKK 1: *Initial Outcome*

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi

IKK 2: *Intermediate Outcome*

Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi pada (t-2)

IKK 3: *Initial Outcome*

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi

IKK 4: *Intermediate Outcome*

Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Transportasi

IKK 5: *Initial Outcome*

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang Transportasi

IKK 6: *Intermediate Outcome*

Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan SDM Bidang Transportasi yang Diterima/Dimanfaatkan Stakeholder

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit eselon II, Sasaran Program Kedua (SP.2) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) yaitu:

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Kebijakan Transportasi dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

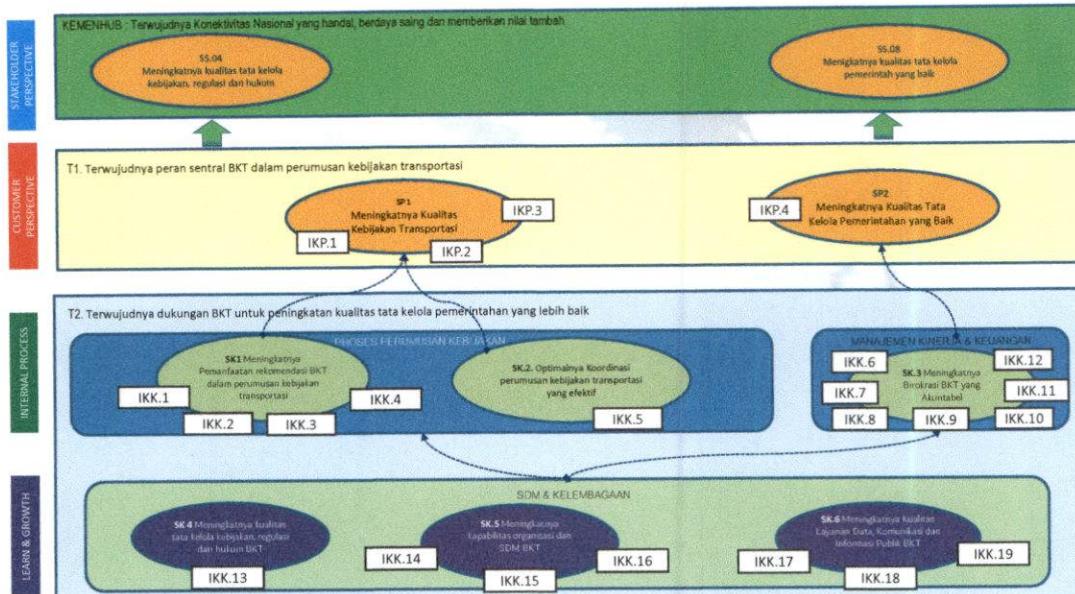
IKK 7: Tingkat Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi

Sasaran Kegiatan yang kedua yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

- Pemerintahan yang Baik, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

IKK 8: Tingkat Maturitas SPIP

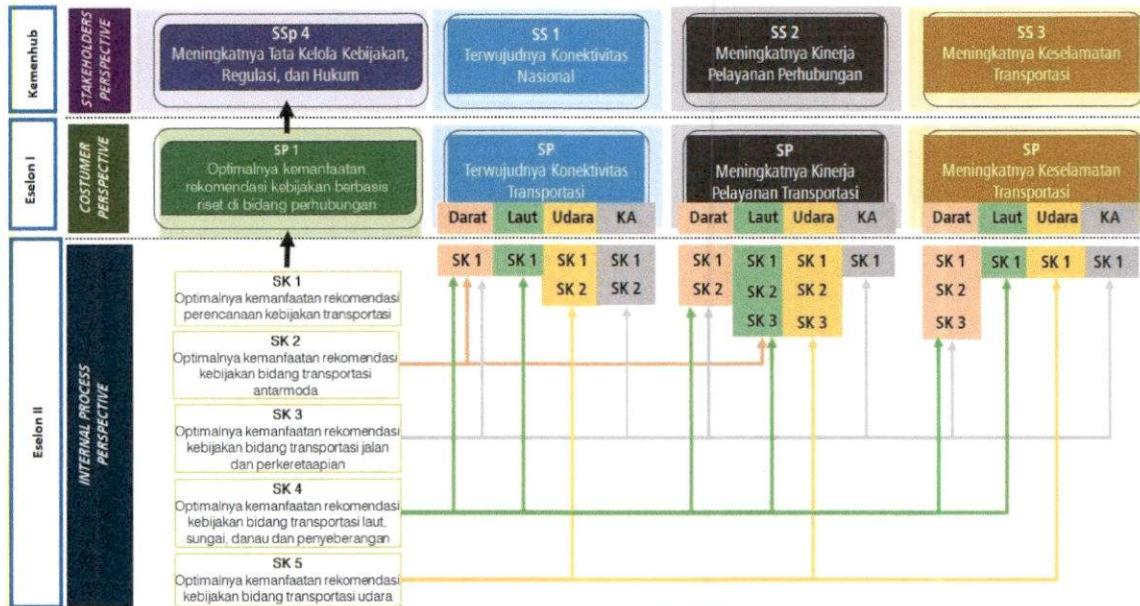
Selengkapnya, Peta Strategis Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan *Cascading Lintas Unit Eselon 1* sebagai Proses *Mirroring* dengan Sektor Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi 2022

(Sumber: RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024)

Peta strategis tersebut menjadi dasar turunan penyusunan sasaran strategis unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Badan Kebijakan Transportasi dapat merepresentasikan kinerja organisasi secara menyeluruh. Sehingga kinerja Pusjak Prasarana dan Integrasi Moda tidak hanya dari keberhasilan pemenuhan kebutuhan *stakeholder* tetapi juga dalam pengembangan proses bisnis yang efektif dan efisien melalui peningkatan kinerja Analisis itu sendiri, kapasitas SDM, tata kelola dan manajemen organisasi serta anggaran.



Gambar 2.2 Cascading Lintas Unit Eselon 1 sebagai Proses Mirroring dengan Sub Sektor Kementerian Perhubungan

Gambar diatas memperlihatkan untuk kelompok *stakeholder perspective*, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengikuti strategi di tingkat Kementerian Perhubungan, pada Sasaran Strategis Penunjang ke-empat (SSp 4) yaitu Meningkatnya Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum dengan Indikator Kinerja Strategis Penunjang keempat (IKSp 4): Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum. Selain SSp 4, Pusjak Prasarana Transportasi dan Intgrasi Moda pun mengikuti Sasaran Strategis Penunjang Kementerian Perhubungan yang ke-delapan (SSp 8) yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Hal ini mengingat tugas dan fungsi organisasi, yaitu peran Pusjak Prasarana Transportasi dan Intgrasi Moda sebagai unit kerja penunjang dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Perhubungan.

Sementara itu dari sisi perspektif pelanggan (*customer perspective*), terdapat 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang diwujudkan melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara rinci penjabaran sasaran strategi dan indikator kinerja kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Intgrasi Moda targetnya sebagaimana tercantum dalam Renstra Pusjak Prasarana Transportasi dan Intgrasi Moda Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Target dan Indikator Kinerja dalam Renstra Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Optimalnya Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	<i>Initial Outcome</i>						
		IKK 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholders ----- x 100%	75%	75%	80%	85%
		<i>Intermediate Outcome</i>						
		IKK 2	Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi pada (t-2)	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholders ----- x 100%	36%	36%	37%	38%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
<i>Initial Outcome</i>								
		IKK 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	Jumlah rekomendasi kebijakan dari hasil Analisis Kebijakan Isu Strategis Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders ----- x 100% Jumlah hasil rekomendasi kebijakan Isu Strategis Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang diajukan	75%	75%	80%	85%	90%
<i>Intermediate Outcome</i>								
		IKK 4 Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Transportasi	Jumlah rekomendasi kebijakan dari hasil Analisis Kebijakan Isu Strategis Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang dimanfaatkan oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders ----- x 100% Jumlah hasil rekomendasi kebijakan Isu Strategis	30%	30%	30%	32%	32%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang diajukan					
<i>Initial Outcome</i>								
	IKK 5	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang Transportasi	Jumlah rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standardisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia yang diterima Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholder ----- x 100% Jumlah rekomendasi hasil evaluasi implentasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standardisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia yang diajukan	75%	75%	80%	85%	90%
<i>Intermediate Outcome</i>								
	IKK 6	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi	Jumlah rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standardisasi IPTEK dan	30%	31%	32%	33%	34%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		IPTEK dan SDM Bidang Transportasi yang Diterima/Dimanfaatkan Stakeholder	Sumber Daya Manusia yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholder ----- x 100% Jumlah rekomendasi hasil evaluasi implemtasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standardisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia yang diajukan pada t-2					
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Kebijakan Transportasi dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKK 7	Tingkat Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Jumlah Kegiatan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang terselenggara ----- x 100% Jumlah Rencana Kegiatan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	80%	80%	85%	85%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	3	3	3	3

Selanjutnya target kinerja di atas dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan awal sebagai dasar penentuan target untuk penyusunan perjanjian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu. Penyusunan target perjanjian kinerja dalam hal ini mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan selama satu tahun tersebut.

2.2 Penetapan Perjanjian Kinerja

Target kinerja kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun secara berjenjang. Adapun penjabaran dari Peta Kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dituangkan dalam indikator kinerja kegiatan dan targetnya. Penetapan kinerja pada awal tahun anggaran mengikuti konsep Rencana Strategis Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	IKK 1	<i>Initial Outcome</i>		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	80
		IKK 2	<i>Intermediate Outcome</i>		
			Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi pada (t-2)	%	37
		IKK 3	<i>Initial Outcome</i>		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	80
		IKK 4	<i>Intermediate Outcome</i>		
			Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Transportasi	%	30

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
		IKK 5	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang Transportasi	% 80
		IKK 6	<i>Intermediate Outcome</i> Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan SDM Bidang Transportasi yang Diterima/ Dimanfaatkan Stakeholder	% 32
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Kebijakan Transportasi dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKK 7	Tingkat Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	% 85
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks 3

Dari tabel diatas, terlihat bahwa target yang dibebankan selama tahun 2022 belum tercapai terutama IKK 2 s.d IKK 6. IKK tersebut belum terlaksana dikarenakan adanya pemblokiran anggaran akibat transformasi atau perubahan Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi pada awal tahun 2022. Sehubungan dengan perubahan/transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi serta Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang mengamanatkan seluruh peneliti beserta tusi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) pada kementerian/lembaga beralih ke BRIN. Pusat Litbang Transportasi Udara melaksanakan kegiatan analisa kebijakan terkait isu strategis di sektor transportasi udara. Saat ini, Pusat

Litbang Transportasi Udara yang kini menjadi Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda telah menyelesaikan 11 (sebelas) analisa kebijakan, judul dari analisa kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Kajian Isu Strategis Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

NO	JUDUL ANALISIS KEBIJAKAN
1	Dukungan Sektor Udara terhadap Ekspor Hasil Perikanan Tangkap
2	Pemanfaatan <i>Sustainable Aviation Fuel</i> (SAF) di Sektor Transportasi Udara
3	Pembentukan Kreatif dan Optimalisasi Aset di Sektor Transportasi Udara
4	Mitigasi Keterbatasan Supply Armada Pesawat Udara terhadap Peningkatan Demand Angkutan Udara
5	Penyesuaian Harga Tiket Angkutan Udara Akibat Pandemi dan Konflik Geopolitik
6	Pola Pengembangan Operasi HEMS di Indonesia
7	Perubahan Tanda Kebangsaan dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara BASARNAS: Pesawat Udara Negara Menjadi Pesawat Udara Sipil Indonesia
8	Penetapan Kriteria <i>Multi-Airport System</i> (MAS) terhadap Bandar Udara yang Berdekatan
9	Efisiensi Biaya Perusahaan Penerbangan
10	Pola Pengembangan Kebijakan Jaringan Pengumpul dan Pengumpan
11	Potensi <i>Land Value Capture</i> dalam Pengembangan Transportasi Masal

Besaran Anggaran Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda untuk tahun 2022 setelah adanya pengalihan anggaran ke BRIN adalah sebesar Rp.7.143.056.000,00. Pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dapat dikatakan berjalan dengan baik.



3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja suatu organisasi melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan atau sebaliknya menjadi kegagalan suatu organisasi. Penilaian akuntabilitas kinerja Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dilakukan melalui pengukuran terhadap capaian kinerja setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dengan cara membandingkan realisasi yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah melalui proses revisi.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Pengukuran Kinerja diawali dengan identifikasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang terbaru dari Perjanjian Kinerja yang diukur tiap bulan, triwulan maupun tahunan. Tahapan pengukuran kinerja saat ini dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, yakni e-performance dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, dan II secara mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya. Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian target realisasi, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda menyusun Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang dilaporkan tiap bulan yang disusun dalam bentuk kertas kerja dengan berisikan format tabel target dan realisasi kinerja yang dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Disamping itu, disusun juga laporan evaluasi terhadap program kegiatan yang diukur setiap triwulan sebagai bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran. Monitoring capaian kinerja output kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan aplikasi e-Monev PP 39 dengan alamat <http://emonev.bappenas.go.id>.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan sasaran kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, maka target dan realisasi kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda tahun

2022 jika dibandingkan dengan target pada revisi Perjanjian Kinerja digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Revisi PK Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI	KINERJA
1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	IKK 1	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	80%	-
		IKK 2	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi pada (t-2)	37%	50% 135,14%
		IKK 3	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	80%	-
		IKK 4	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Transportasi	30%	-
		IKK 5	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK	80%	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI	KINERJA
		dan Sumber Daya Manusianya bidang Transportasi			
		IKK 6 <i>Intermediate Outcome</i> Percentase Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan SDM Bidang Transportasi yang Diterima/ Dimanfaatkan Stakeholder	32%	37,5%	117,19%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Kebijakan Transportasi dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKK 7 Tingkat Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	85%	100%	117,65%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 8 Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	3	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					117,5%

Dikarenakan adanya transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi menyebabkan adanya pengalihan anggaran ke BRIN, hal tersebut menyebabkan beberapa kegiatan di Pusjak Prasarana dan Integrasi Moda tidak dapat dilanjutkan meskipun pada akhirnya unit kerja tetap berusaha untuk melaksanakan kegiatan tanpa anggaran. Pada tahun 2022 Pusjak Prasarana dan Integrasi Moda hanya menjalankan empat indikator kinerja yaitu IKK 2, IKK 6, IKK 7, dan IKK 8 dengan rata-rata tingkat

capaian kinerja 117,5%, dan nilai tersebut dapat dikategorikan cukup baik. Deskripsi mengenai capaian untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN 1

Sasaran Kegiatan ke-1 adalah Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan. Pencapaian sasaran kegiatan kesatu diwujudkan melalui 6 (enam) indikator kinerja kegiatan (IKK), namun pada tahun 2022 hanya terdapat 2 (dua) IKK yang dapat dilaksanakan, yaitu:

1. **IKK 2. Intermediate Outcome** Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada t-2

Hasil penelitian yang menjadi bahan masukan/rekomendasi bagi pengambilan kebijakan menjadi indikator untuk mengukur sasaran program optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan. Pada tahun 2022, jumlah penelitian tahun 2020 yang dilaksanakan dengan skema kontraktual dan swakelola yang ditindaklanjuti rekomendasinya oleh stakeholder terdapat sebanyak 4 (empat) laporan, yakni

- a) Studi Harmonisasi ATFM dan ACDM Guna Kelancaran Layanan Penerbangan di Ruang Udara dan Bandara
 - b) Mitigasi Dampak Lingkungan Akibat Operasi Bandar Udara dan Pengaruh Lingkungan Terhadap Operasi Bandar Udara
 - c) Pengujian Kehandalan dan Pemanfaatan Lanjut Purwarupa *Standing Water Detector* dan *Wind Shear Detector*
 - d) Pengembangan *Anti Bird Strike* yang Efektif untuk Bandar Udara di Indonesia
2. **IKK 6. Intermediate Outcome** Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan SDM Bidang Transportasi yang Diterima/ Dimanfaatkan Stakeholder

Hasil penelitian yang menjadi bahan masukan/rekomendasi bagi pengambilan kebijakan menjadi indikator untuk mengukur sasaran program optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan (Intermediate Outcome). Pada tahun 2022, jumlah kajian yang dikerjakan dengan skema kontraktual dan swakelola yang menjadi bahan rekomendasi/termanfaatkan sebanyak 3 (tiga) laporan,

yakni

- a) Harmonisasi *Waterbase Airport* dan Kebutuhan Wisata Kepulauan
- b) Standar Kesehatan di Sarana dan Prasarana Transportasi Udara dalam Antisipasi Penyebaran Pandemi COVID-19
- c) Kesiapan Indonesia dalam Implementasi Pelatihan Berbasis Upset Prevention and Recovery Training (UPRT)

B. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN 2

Sasaran Kegiatan ke-2 adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Kebijakan Transportasi dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi. Indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam sasaran kegiatan ke-2 adalah **IKK 7.** Tingkat Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator untuk mengukur sasaran kegiatan tersebut antara lain:

- 1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
 - b) Perbaikan Peralatan Kantor
 - c) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2
 - d) Langganan Daya dan Jasa
 - e) Kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan
 - f) Pembayaran Honor Pramubakti dan Sopir
 - g) Pembayaran Honor Pengelola Anggaran
- 2. Administrasi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan Pencegahan Penyebaran Covid-19
- 3. Administrasi Penyusunan Program
 - a) Penyusunan dan pembahasan RKA-KL Tahun 2023 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
 - b) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2023
 - c) Penyusunan Program dan Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun 2023
- 4. Administrasi Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu Strategis Melakukan kegiatan rekomendasi analisis kebijakan 11 isu strategis dengan judul sebagai berikut:
 - a) Dukungan Sektor Udara terhadap Ekspor Hasil Perikanan Tangkap

- b) Mitigasi Keterbatasan Supply Armada Pesawat Udara terhadap Peningkatan Demand Angkutan Udara
 - c) Pembiayaan Kreatif dan Optimalisasi Aset di Sektor Transportasi Udara
 - d) Pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Sektor Transportasi Udara
 - e) Penetapan Kriteria Multi-Airport System (MAS) terhadap Bandar Udara yang Berdekatan
 - f) Penyesuaian Harga Tiket Angkutan Udara Akibat Pandemi dan Konflik Geopolitik
 - g) Pola Pengembangan Operasi HEMS di Indonesia
 - h) Perubahan Tanda Kebangsaan dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara BASARNAS: Pesawat Udara Negara Menjadi Pesawat Udara Sipil Indonesia
 - i) Efisiensi Biaya Perusahaan Penerbangan
 - j) Pola Pengembangan Kebijakan Jaringan Pengumpul dan Pengumpan
 - k) Potensi *Land Value Capture* dalam Pengembangan Transportasi Masal
5. Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan
- a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - b) Penyusunan Laporan Tahunan
 - c) Penyusunan Perjanjian Kinerja Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023
 - d) Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2023
 - e) Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Monitoring, Analisa, dan Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Lebaran
 - f) SPIP
6. Layanan Manajemen Keuangan
- a) Pengelolaan BMN
 - b) Pengelolaan Ketatausahaan, Umum, dan SDM Penunjang Teknis Transportasi Udara
7. Administrasi Publikasi dan Kehumasan
- a) Penerbitan Jurnal
 - b) Penyusunan Database

C. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN 3

Sasaran Kegiatan ke-3 adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik, dengan indikator kinerja kegiatan yang termasuk di dalamnya adalah **IKK 8**. Tingkat Maturitas SPIP. Indikator sasaran kegiatan ke-3 adalah berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan pada tahun 2022 penilaian tingkat maturitas SPIP adalah sebesar 3.

Sesuai dengan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2022 yang terdiri dari 8 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), maka analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan atau penurunan, serta alternatif terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. **IKK 1. Initial Outcome** Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi.

Pada tahun 2022 kegiatan pada IKK 1 tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya pemblokiran anggaran akibat transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Meskipun tidak ada anggaran kegiatan, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengusahakan tetap melaksanakan kajian-kajian yang merupakan arahan atau permintaan dari Pimpinan atau Menteri Perhubungan

2. **IKK 2. Intermediate Outcome** Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi pada t-2

Pada tahun 2022, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berhasil mencapai jumlah kemanfaatan rumusan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan pada tahun 2020 sebanyak 4 judul kajian dari target 37% dari 8 judul kajian, sehingga realisasi dari target pada tahun 2022 adalah sebesar 50% dengan capaian kinerja 135,14%. Keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan, karena kajian yang dilakukan pada tahun 2020 tersebut merupakan kebutuhan dari isu strategis yang diperlukan oleh subsektor transportasi untuk memenuhi kondisi lapangan, serta menunjang bisnis online yang ada di Indonesia

3. **IKK 3. Initial Outcome** Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi

Pada tahun 2022 kegiatan pada IKK 3 tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya pemblokiran anggaran akibat transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Meskipun tidak ada anggaran kegiatan, Pusjak

Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengusahakan tetap melaksanakan kajian-kajian yang merupakan arahan atau permintaan dari Pimpinan atau Menteri Perhubungan.

4. **IKK 4. Intermediate Outcome** Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Transportasi

Pada tahun 2022 kegiatan pada IKK 4 tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya pemblokiran anggaran akibat transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Meskipun tidak ada anggaran kegiatan, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengusahakan tetap melaksanakan kajian-kajian yang merupakan arahan atau permintaan dari Pimpinan atau Menteri Perhubungan.

5. **IKK 5. Initial Outcome** Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang Transportasi

Pada tahun 2022 kegiatan pada IKK 5 tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya pemblokiran anggaran akibat transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Meskipun tidak ada anggaran kegiatan, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengusahakan tetap melaksanakan kajian-kajian yang merupakan arahan atau permintaan dari Pimpinan atau Menteri Perhubungan.

6. **IKK 6. Intermediate Outcome** Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan SDM Bidang Transportasi yang Diterima/ Dimanfaatkan Stakeholder

Pada tahun 2022, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berhasil mencapai jumlah kemanfaatan hasil kajian sebanyak 3 (tiga) judul kajian dari target 32% dari 8 judul kajian, sehingga realisasi dari target pada tahun 2022 adalah sebesar 37,5% dengan capaian kinerja 117,19%. Keberhasilan kemanfaatan hasil kajian ini, dikarenakan kajian yang dilaksanakan merupakan kebutuhan di lapangan.

7. **IKK 7.** Tingkat Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi

Selama satu tahun kegiatan yang termasuk dalam Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi kebijakan transportasi dapat berjalan dengan baik, meskipun terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang sudah biasa dilaksanakan dan tersistematis secara aplikasi, sehingga semuanya dapat terlaksana.

8. **IKK 8.** Tingkat Maturitas SPIP

Keberhasilan pencapaian realisasi sebesar 3, dengan capaian kinerja sebesar 100%, melebihi dari yang ditargetkan disebabkan dukungan dari semua pihak untuk mengumpulkan dan mendukung semua data yang diperlukan untuk memenuhi penilaian maturitas SPIP mulai dari Eselon II sampai dengan staf yang ditunjuk dan internal manajemen Puslitbang Transportasi Udara

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mampu mengerjakan kegiatan analisis kebijakan meski tanpa anggaran dikarenakan ada pemblokiran anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Dengan jumlah SDM analis kebijakan sebanyak 16 pegawai dengan beberapa staf dan tenaga honorer, maka SDM yang ada dinilai cukup efisien untuk mengerjakan kegiatan analisis kebijakan sebanyak 11 kajian isu strategis. Efisiensi SDM yang ada juga didukung oleh keterlibatan pihak instansi/stakeholder dibidang transportasi, perguruan tinggi, dan lainnya yang dijadikan narasumber dalam setiap kegiatan analisis kebijakan sehingga kegiatan analisis kebijakan dapat berjalan dan dapat diselesaikan dengan baik.

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi total anggaran tahun 2022 setelah adanya revisi anggaran adalah sebesar Rp7.143.056.000,00 yang seluruhnya merupakan layanan untuk belanja barang dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.119.120.494 yang artinya memiliki daya serap sebesar 99,66%. Dana yang tidak terserap pada tahun 2022 adalah sebesar Rp23.935.506,00 atau

sebesar 0,34%. Tingkat capaian daya serap anggaran Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi Tahun 2018-2022

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (%)
2018	23.022.889.000	20.221.780.936	87,83
2019	22.368.010.000	22.082.895.855	98,73
2020	24.095.758.000	23.850.280.109	98,98
2021	21.024.286.000	20.706.646.148	98,49
2022	7.143.056.000	7.119.120.494	99,66

Jika dilihat dari output fisik yang dihasilkan, penyerapan anggaran Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dapat dikatakan baik. Selama pelaksanaan anggaran tahun 2022, pengelola keuangan berusaha untuk melakukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran agar dapat terealisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan.



BABY
PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda secara keseluruhan ditunjukkan melalui nilai rata-rata capaian kinerja per kegiatan pada IKK 2, IKK 6, IKK 7, dan IKK 8 sebagai berikut

1. **IKK 2. Initial Outcome** Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada t-2 sebesar 50% dengan capaian kinerja 135,14%
2. **IKK 6. Intermediate Outcome** Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungan, subsektor, dan stakeholder sebesar 37,5% dengan capaian kinerja sebesar 117,19%
3. **IKK 7.** Tingkat Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi, selama satu tahun sebesar 32 laporan, dengan capaian kinerja sebesar 117,65%
4. **IKK 8.** Tingkat Maturitas SPIP dengan level 3, sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%
5. Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan belanja barang dengan pagu anggaran sebesar Rp7.143.056.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp7.119.120.494,00 (99,66%)

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

4.2.1 Perencanaan Kinerja

Untuk aspek perencanaan yang lebih baik maka kedepannya perlu memperhatikan beberapa hal, seperti:

1. Memperhatikan perencanaan yang terkait dengan anggaran untuk penggajian pegawai sehingga sesuai dengan kebutuhan;
2. Melakukan koordinasi dengan tim evaluator dan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar ketidak sempurnaan pada tahun sebelumnya dapat diminimalisir pada saat tahapan perencanaan;
3. Melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan kinerja apabila terjadi perubahan lingkungan strategis;
4. Memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan selaras satu dengan yang lainnya;
5. Menyusun timeline pelaksanaan rencana kegiatan agar bisa berakhir tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun.

4.2.2 Pengukuran Kinerja

Hendaknya pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap tahapan kegiatan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pada waktu tertentu (bulanan, triwulan atau semester), sehingga dapat disusun suatu rencana untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang telah disusun.

4.2.3 Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja membutuhkan dukungan data dan koordinasi dengan bagian/bidang lainnya terutama bagian keuangan, sehingga diharapkan peran aktif dan partisipasi bagian lain dalam memberikan bahan dan data dukung pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja dapat dipantau melalui grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi. Perlu dukungan semua pihak dalam melakukan pelaporan kinerja terutama dengan aplikasi dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas.

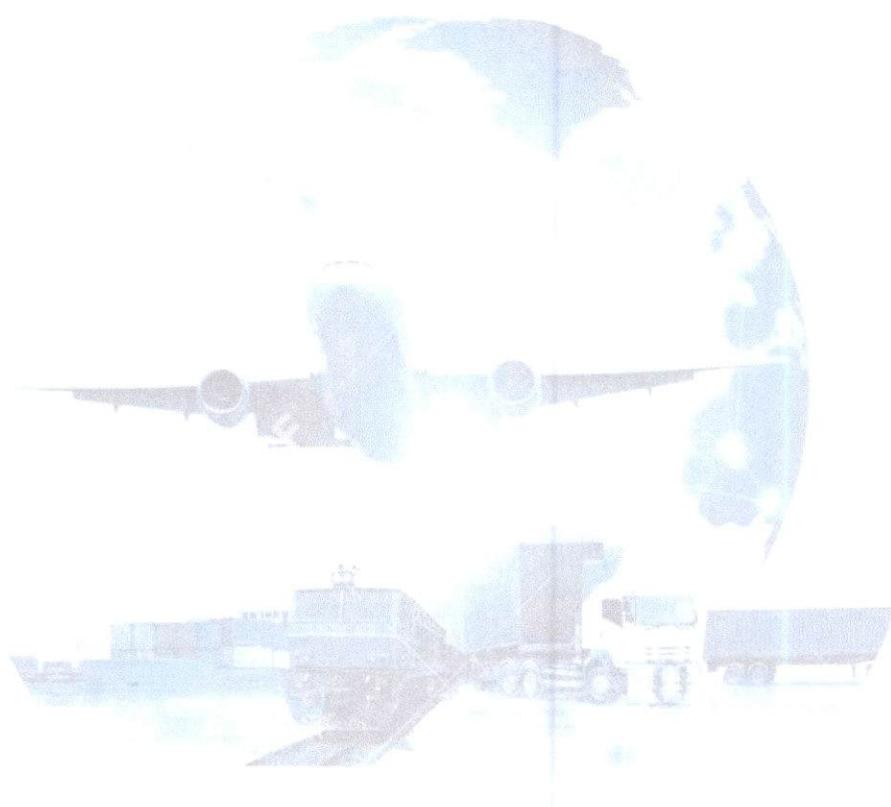
4.2.4 Evaluasi Kinerja

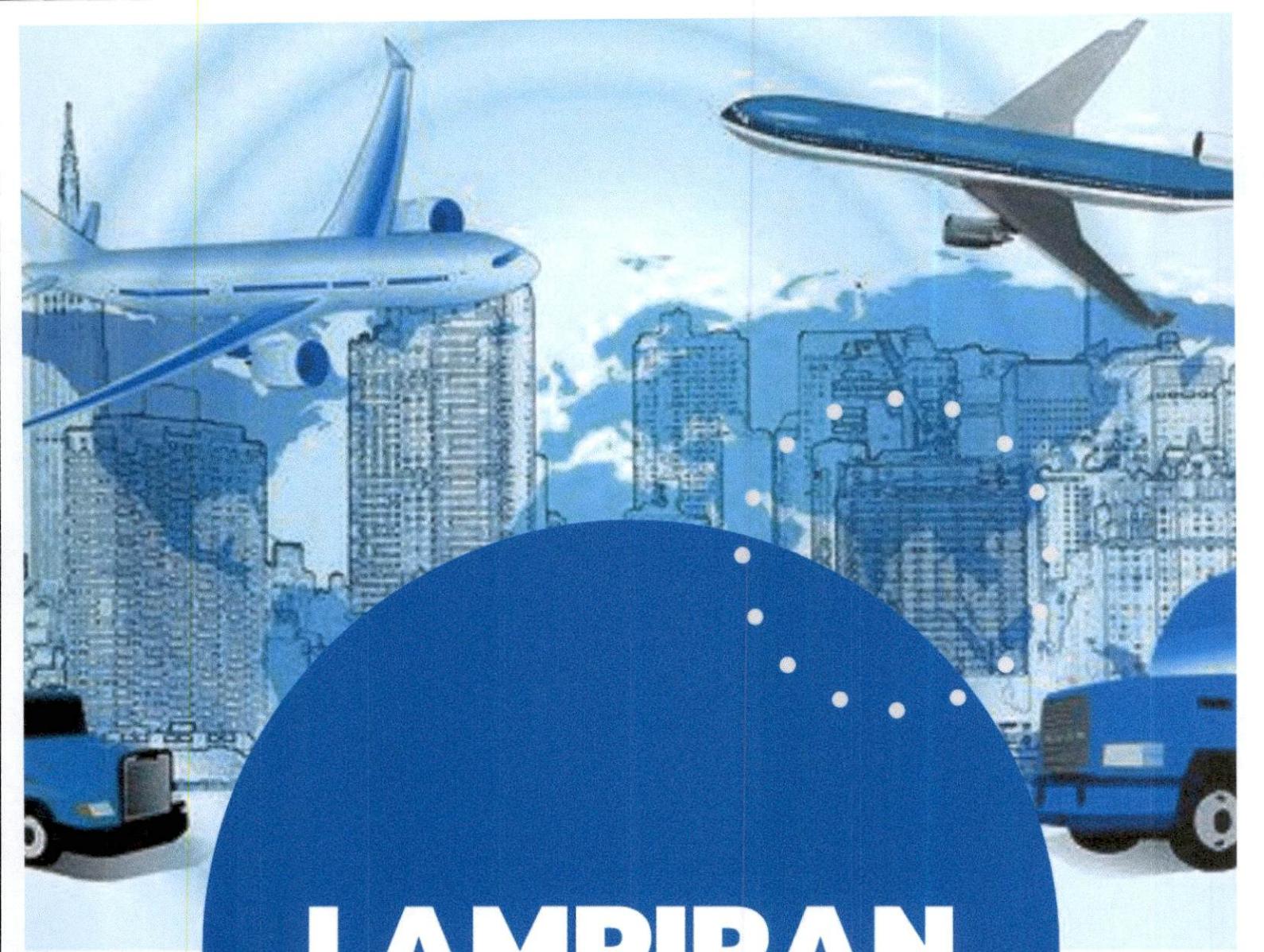
1. Menambah dan meningkatkan kemampuan SDM Analis Kebijakan melalui bimbingan teknis, serta melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengerjakan isu-isu strategis transportasi.
2. Dalam rangka menghadapi semakin tingginya tuntutan pelayanan jasa perhubungan, kualitas SDM yang handal perlu terus ditingkatkan dan dibarengi dengan peningkatan iklim kerja yang kondusif serta ketersediaan fasilitas penunjang yang mengikuti perkembangan teknologi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pola pengembangan karier para Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya.
3. Perlu harmonisasi antara Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan stakeholder terkait maupun pemerintah daerah untuk pelaksanaan perumusan kebijakan, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya.
4. Perlu koordinasi antara bagian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran agar daya serap maksimal.
5. Perlu menjaga ritme konsistensi waktu penggeraan tugas agar sesuai dengan *timeline* yang telah disusun pada saat tahapan perencanaan.

4.2.5 Capaian Kinerja

Capaian kinerja perlu terus ditingkatkan dan tepat waktu memberikan pelaporan kepada pimpinan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mencapai target kinerja.

- Aplikasi yang saat ini tersedia dapat digunakan untuk melakukan monitoring capaian kinerja, oleh karena itu harus rajin melakukan update dan dijaga kualitasnya agar tidak terjadi masalah pada saat pengisian capaian kinerja





LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DAN INTEGRASI MODA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET
1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	IKK 1	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	80
		IKK 2	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi pada (I-2)	%	37
		IKK 3	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	80
		IKK 4	<i>Intermediate Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Transportasi	%	30
		IKK 5	<i>Initial Outcome</i> Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang Transportasi	%	80
		IKK 6	<i>Intermediate Outcome</i> Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan SDM Bidang Transportasi yang Diterima/ Dimanfaatkan Stakeholder	%	32

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Kebijakan Transportasi dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKK 7	Tingkat Penyelenggaraan penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	85
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKK 8	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Riset Kebijakan | Rp. 6.714.346.000,- |
| 2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan | Rp. 962.280.000,- |

Jakarta, September 2022

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Kepala
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi
dan Integrasi Moda

Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196307171989031002

Capt. NOVYANTO WIDADI, S.AP., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681123 201611 1 001

Lampiran 2. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022



BÉNÉFICIAIRE ATLAS PÉLÉVÉGUEUR KONG RUA TAHRUM 2022
BÉNÉFICIAIRE ATLAS PÉLÉVÉGUEUR KONG RUA TAHRUM 2022

DRAFT - April 2022
GENERAL PLANS UTMING TRANSPORTATION WORKS

Lampiran 3. Realisasi Daya Serap Tahun 2022

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
 Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
 Periode Desember 2022

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 Unit Organisasi 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
 Satuan Kerja : 288951 PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

Hal 1 dari 13

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7,143,056,000	0	6,249,893,048	869,227,446	7,119,120,494	99.66 %	23,935,506
WA Program Dukungan Manajemen	7,143,056,000	0	6,249,893,048	869,227,446	7,119,120,494	99.66 %	23,935,506
WA.4653 Perencanaan, Keuangan, BIMN dan Umum Riset Kebijakan	6,180,776,000	0	5,489,293,908	669,925,037	6,159,218,945	99.65 %	21,557,055
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,877,043,000	0	1,632,304,607	238,943,056	1,871,247,663	99.69 %	5,795,337
EBA.962 Layanan Umum	418,836,000	0	394,844,308	21,868,153	416,712,461	99.49 %	2,123,539
101 Administrasi Periengkapan dan Keruahatangan	418,836,000	0	394,844,308	21,868,153	416,712,461	99.49 %	2,123,539
101.0A PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19	418,836,000	0	394,844,308	21,868,153	416,712,461	99.49 %	2,123,539
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	395,895,000	0	375,462,308	19,053,153	394,515,461	99.65 %	1,379,539
003448. Masker Medis	128,790,000	0	120,000,000	8,320,000	128,320,000	99.64 %	470,000
003449. Hand Sanitizer Pegawai	19,035,000	0	18,025,000	780,000	18,805,000	98.79 %	230,000
003450. Hand Sanitizer Ruangan	10,200,000	0	10,050,000	0	10,050,000	98.53 %	150,000
003451. Suplemen/Vitamin	185,328,000	0	184,806,945	0	184,806,945	99.72 %	521,055
003453. Lisensi Presensi Online	3,252,000	0	1,318,169	1,925,647	3,243,816	99.75 %	8,184
003454. Lisensi Video Conference	49,290,000	0	41,262,194	8,027,506	49,289,700	100.00	300
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,923,000	0	17,364,000	2,815,000	20,179,000	96.44 %	744,000
003457. Rapid test	14,850,000	0	14,706,000	0	14,706,000	99.03 %	144,000
003458. Swab Test	6,073,000	0	2,658,000	2,815,000	5,473,000	90.12 %	600,000
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,018,000	0	2,018,000	0	2,018,000	100.00	0
003459. Rapid test - PCR (perjalanan dinas)	2,018,000	0	2,018,000	0	2,018,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,458,207,000	0	1,237,460,299	217,074,903	1,454,535,202	99.75 %	3,671,798
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,458,207,000	0	1,237,460,299	217,074,903	1,454,535,202	99.75 %	3,671,798
002.0A Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	143,505,000	0	88,488,000	53,725,000	142,213,000	99.10 %	1,292,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	143,505,000	0	88,488,000	53,725,000	142,213,000	99.10 %	1,292,000
000977. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	54,400,000	0	53,504,000	0	53,504,000	98.35 %	896,000
000978. Pengadaan Pakaian Dinas Pengemudi dan Pramubakti	12,980,000	0	12,584,000	0	12,584,000	96.95 %	396,000
004397. Pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22,400,000	0	22,400,000	0	22,400,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Lampiran 4. Tingkat Kemanfaatan dari Hasil Rekomendasi Kajian Tahun 2020 yang Diberikan Kepada Stakeholder

IKK 2. Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi pada (t-2)

NO	JUDUL PENELITIAN	STAKEHOLDER	KEMANFAATAN
1	Studi Harmonisasi ATFM dan ACDM Guna Kelancaran Layanan Penerbangan di Ruang Udara dan Bandara	Airnav	Harmonisasi ATFM dan ACDM memiliki fungsi sebagai bentuk mitigasi jika terdapat kendala di ruang udara dan bandara. Studi yang dilakukan sebelumnya mengambil lokus Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan saat ini sedang terus dilakukan penyempurnaan beberapa sistem karena masih ditemui kendala teknis baik dari sisi Airline, Angkasa Pura, maupun Airnav. Kegiatan koordinasi dan monitoring implementasi terhadap pemanfaatan hasil studi telah dilakukan pada tanggal 29 - 31 Agustus 2022.
2	Mitigasi Dampak Lingkungan Akibat Operasi Bandar Udara dan Pengaruh Lingkungan Terhadap Operasi Bandar Udara	Angkasa Pura I	Sebagai bentuk tindak lanjut dari kajian yang dilakukan oleh Pusat Litbang Transportasi Udara, Angkasa Pura I telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diimplementasikan dalam laporan RKL-RPL di 15 bandara sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki masing-masing bandara dan dilakukan pula pelaporan kepada instansi lingkungan hidup dan instansi pengelola transportasi (Ditjen Perhubungan Udara) setiap semester. Selain itu, Angkasa Pura I juga telah melakukan penyusunan kajian rona awal Bandara Bali Utara pada tahun 2021 sebagai baseline untuk mengetahui kondisi lingkungan sebelum adanya aktivitas pembangunan dan pengoperasian bandara.
3	Pengujian Kehandalan dan Pemanfaatan Lanjut Purwarupa <i>Standing Water Detector</i> dan <i>Wind Shear Detector</i>	Angkasa Pura I (Bandara YIA)	Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan sedang dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pendaftaran hak paten, dan alat yang diciptakan bersama dengan Perguruan Tinggi Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut telah dilakukan uji coba dan digunakan di Bandara Yogyakarta Internasional Airport.
4	Pengembangan <i>Anti Bird Strike</i> yang Efektif untuk Bandar Udara di Indonesia	KLHK	Sedang ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU di Tahun 2022 (menunggu pelantikan Dirjen Perhubungan Udara)

IKK 6. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi IPTEK dan SDM Bidang Transportasi yang Diterima/ Dimanfaatkan Stakeholder

NO	JUDUL PENELITIAN	STAKEHOLDER	KEMANFAATAN
1	Harmonisasi <i>Waterbase Airport</i> dan Kebutuhan Wisata Kepulauan	Pemerintah Daerah	Sebagai dasar penyusunan detail teknis pembangunan waterbase di daerah (telah dijadikan referensi oleh Bappenas dan beberapa Pemerintah Daerah)
2	Standar Kesehatan di Sarana dan Prasarana Transportasi Udara dalam Antisipasi Penyebaran Pandemi COVID-19	Kementerian Perhubungan	Studi ini menjadi rujukan dalam penerbitan Surat Edaran Menteri Perhubungan mengenai pembatasan perjalanan terutama di bidang transportasi udara. Namun terkait anggaran belum dapat terlaksana dikarenakan terdapat blokir dan pemindahan ke BRIN sejalan dengan adanya transformasi Balitbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi
3	Kesiapan Indonesia dalam Implementasi Pelatihan Berbasis Upset Prevention and Recovery Training (UPRT)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti oleh BPSDM dalam menyusun kurikulum dan DKUPPU dalam menetapkan regulasi regulasi serta evaluasi terhadap kesiapan sarana prasarana terkait. Puslitbang Transportasi Udara telah diundang menjadi narasumber dalam rapat dan FGD yg diadakan oleh kedua institusi tersebut, dimana keduanya tengah menyiapkan kebijakan implementasi UPRT ini di Indonesia.

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Kemanfaatan Hasil Kajian Tahun 2020

